E-ISSN: 3025-0994
Halaman 9438-9454
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Rehabilitasi Sosial Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pangkalpinang

Subri Rahmadani[1], Iskandar Zulkarnain[2] ,Hidayati[3]

[1,2,3] Program Studi Sosiologi, Universitas Bangka Belitung
e-mail: subrirhmdn61@gmail.com

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Hingga November 2025, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bareskrim Polri mencatat sebanyak 21.945 anak dan remaja berhadapan dengan hukum. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pangkalpinang sebagai satu-satunya lembaga pembinaan anak juga mengalami peningkatan jumlah anak binaan dari 16 orang pada 2021 menjadi 39 orang pada 2025. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial anak binaan serta menganalisis dampaknya terhadap kesiapan mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui asesmen, pembinaan kepribadian dan kemandirian, evaluasi berbasis instrumen, serta persiapan reintegrasi sosial. Rehabilitasi tersebut berdampak pada perubahan perilaku dan kedisiplinan, perkembangan kemampuan interaksi sosial, serta peningkatan kesadaran diri dan orientasi masa depan anak binaan. Temuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial di LPKA tidak hanya berfungsi sebagai program pembinaan, tetapi juga sebagai proses pembentukan makna, identitas diri, dan kesiapan sosial anak binaan melalui interaksi yang berlangsung selama masa pembinaan.

Kata Kunci : *Rehabilitasi Sosial, Anak Berhadapan Hukum, Interaksionisme Simbolik, LPKA*

Abstract

Children in conflict with the law (CICL) remain a significant social issue in Indonesia. As of November 2025, the Research and Development Center of the Indonesian National Police (Puslitbang Bareskrim Polri) recorded 21,945 children and adolescents involved in legal cases. In the Bangka Belitung Islands Province, the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) Pangkalpinang, the only juvenile correctional institution in the province,

also experienced an increase in the number of juvenile inmates, from 16 in 2021 to 39 in 2025. This study aims to describe the social rehabilitation process for juvenile inmates and examine its impact on their readiness to reintegrate into their families and communities. A qualitative method with an intrinsic case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation, and analyzed using George Herbert Mead's symbolic interactionism perspective. The findings indicate that social rehabilitation is implemented through assessment, personality and vocational development programs, instrument-based evaluation, and social reintegration preparation. The rehabilitation process contributes to improvements in behavioral discipline, social interaction skills, self-awareness, and future orientation. The study concludes that social rehabilitation at LPKA serves not merely as a correctional program but as a process of constructing meaning, self-identity, and social readiness through continuous interaction among juvenile inmates, correctional officers, and the institutional environment.

Keywords: *Social Rehabilitation, Children In Conflict With The Law, Symbolic Interactionism, LPKA*

LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian integral dari generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional dan harus dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh secara optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian anak justru terjerumus dalam perilaku menyimpang yang berujung pada pelanggaran hukum. Berdasarkan data Puskinas Bareskrim Polri, hingga November 2025 tercatat 21.945 anak dan remaja berusia di bawah 20 tahun yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, meliputi kasus pencurian, penganiayaan, perkelahian, hingga penyalahgunaan narkotika (Puskinas Bareskrim Polri, 2025). Data Mahkamah Agung RI periode Januari-Agustus 2023 turut mencatat 4.749 perkara anak yang masuk Pengadilan Negeri, dengan 1.352 anak dijatuhi pidana pokok (Mahkamah Agung RI, 2024), sementara SIMFONI-PPA mencatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2024 (KemenPPPA, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan formal belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan pendekatan rehabilitatif yang menekankan pembinaan perilaku dan pemulihan fungsi sosial anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan, serta penghindaran dari stigma sosial (Pangestika & Nurwati, 2020). Prinsip tersebut diwujudkan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjalankan pidana sekaligus pembinaan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif. LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang, yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan satu-satunya lembaga pembinaan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dan bertanggung jawab memberikan pembinaan pendidikan, kepribadian, serta kemandirian bagi anak binaan (Buana et al., 2025). Data lembaga menunjukkan tren peningkatan jumlah anak binaan yang konsisten, yaitu 16 anak (2021), 22 anak (2022), 33 anak (2023), 38 anak (2024), dan 39 anak (2025), yang mayoritas berusia 16-18 tahun dengan kasus dominan berupa penyalahgunaan narkotika, diikuti kasus asusila.

Rehabilitasi sosial di LPKA dilaksanakan melalui tahapan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, tingkat ketergantungan, dan latar belakang sosial anak binaan, yang menjadi dasar penyusunan Individual Treatment Plan, dilanjutkan dengan implementasi program pembinaan, evaluasi, serta persiapan reintegrasi sosial (Ditjenpas, 2023). Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead sebagai kerangka analisis, karena rehabilitasi sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian program formal, melainkan sebagai proses interaksi sosial yang membentuk makna, kesadaran diri, dan identitas melalui konsep mind, self, dan society (Mead, 1934; Blumer, 1969). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana proses rehabilitasi sosial pada anak binaan berhadapan hukum di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang dilaksanakan, dan bagaimana dampak program rehabilitasi sosial tersebut terhadap kesiapan anak binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial yang diterapkan melalui program pembinaan, keagamaan, konseling, dan kemandirian, serta menganalisis dampaknya terhadap perubahan perilaku, kemampuan interaksi sosial, dan kesiapan anak binaan untuk kembali berfungsi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dari berbagai sudut pandang. Andriyana (2020) menyoroti pola pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dengan penekanan pada aspek kepatuhan tata tertib, sementara Shaleh dkk. (2022) mengkaji efektivitas pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dari sisi capaian program. Parasian dan Rohayati (2024) meneliti efektivitas rehabilitasi sosial dengan pendekatan biopsikososial di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bandung, sedangkan Prayitno dkk. (2023) menyoroti hambatan pemenuhan hak pendidikan di lembaga koreksional anak di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada evaluasi keterlaksanaan program atau capaian formal pembinaan, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam proses pemaknaan dan pembentukan identitas sosial anak binaan melalui interaksi sehari-hari di dalam lembaga. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan interaksionisme simbolik George Herbert Mead sebagai lensa analisis untuk memahami bagaimana rehabilitasi sosial di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang membentuk mind, self, dan society anak binaan, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap kesiapan mereka untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, yang dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik rehabilitasi sosial serta dinamika interaksi sosial di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang sebagai satu kesatuan kasus yang utuh dan spesifik (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Penelitian dilaksanakan di LPKA Kelas II Pangkalpinang yang beralamat di Jl. A. Yani No. 16a, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dengan informan, serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku, dan dokumen kelembagaan yang relevan (Hardani et al., 2020). Penentuan informan dilakukan secara purposif, berjumlah sepuluh orang, mencakup satu informan kunci, yaitu Plh. Kepala LPKA sekaligus Kepala Seksi Pembinaan (Bapak Didik Setiawan), serta sembilan anak binaan yang seluruhnya menjalani proses pembinaan atas kasus penyalahgunaan narkotika (Creswell, 2018). Identitas lengkap informan disajikan pada Tabel 1, dengan nama anak binaan disamarkan menjadi berdasarkan huruf untuk melindungi privasi dan kepentingan terbaik anak sebagai subjek penelitian yang rentan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan, observasi non-partisipatif untuk mengamati aktivitas harian, pola interaksi, dan pelaksanaan program pembinaan tanpa memengaruhi proses yang berlangsung, serta dokumentasi berupa data administratif, foto, dan dokumen kelembagaan yang relevan (Hardani et al., 2020). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan yang berlangsung secara berkelanjutan, yaitu reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data (Rijali, 2018).

Tabel 1. Identitas Informan

No	Nama	Kedudukan	Instansi
1	Didik Setiawan	Plh Kepala LPKA & Pembina LPKA	LPKA
2	F	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
3	Z A	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
4	I A	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
5	S A	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
6	B P	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
7	S A	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
8	A R	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
9	G	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA
10	C	Anak Binaan (Kasus Narkotika)	LPKA

Informan anak binaan dipilih berdasarkan kriteria keterwakilan lama masa pembinaan dan pengalaman menjalani program rehabilitasi, sedangkan seluruh informan anak berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika sesuai proporsi kasus dominan pada populasi anak binaan LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman secara naratif dan terbuka. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari petugas pembinaan dengan pernyataan anak binaan, serta triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara terhadap temuan observasi dan dokumentasi kelembagaan. Melalui prosedur tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi rehabilitasi sosial yang berlangsung di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang, bukan sekadar persepsi tunggal dari salah satu pihak. Mengingat status anak binaan sebagai subjek penelitian yang rentan, pengumpulan data dilaksanakan dengan memperoleh persetujuan dari pihak LPKA selaku wali sementara serta kesediaan anak binaan secara sukarela (informed assent), disertai penyamaran identitas informan anak untuk menjaga kerahasiaan dan hak privasi mereka sesuai prinsip etika penelitian terhadap subjek anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik George Herbert Mead untuk memahami bagaimana interaksi sosial di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang membentuk makna, sikap, dan perilaku anak binaan. Konsep mind menggambarkan cara anak memahami nilai dan aturan pembinaan, self menjelaskan proses pembentukan identitas diri melalui pengalaman interaksi, sedangkan society merefleksikan peran lingkungan sosial lembaga dalam membentuk perilaku anak binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, anak binaan di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang mayoritas berusia 16–18 tahun dan didominasi oleh laki-laki, sedangkan anak binaan perempuan berjumlah empat orang. Sebagian besar anak binaan terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, diikuti kasus asusila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang anak binaan didominasi oleh dua faktor utama, yaitu disharmoni keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan yang menyimpang. Temuan tersebut disampaikan oleh Plh. Kepala LPKA, Bapak Didik Setiawan, yang menyatakan:

> *"Kurang harmonisnya hubungan antar orang tua itu menjadi faktor utama, menyebabkan anak itu rumah tidak menjadi tempat yang nyaman, justru dia mencari tempat yang nyaman itu di jalanan."* (Wawancara, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan anak binaan yang mengaitkan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika dengan perceraian orang tua dan

pengaruh teman sebaya. Dalam perspektif Mead, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum memasuki LPKA, pembentukan self anak binaan dipengaruhi oleh significant others yang memberikan pengaruh negatif. Di sisi lain, ketiadaan figur orang tua yang stabil menyebabkan anak kehilangan generalized other sebagai pedoman normatif dalam pembentukan identitas diri.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh informan anak binaan lainnya. Informan menjelaskan bahwa pengaruh teman sebaya menjadi awal keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana disampaikan:

> *"Awalnya saya tidak tahu apa-apa, teman-teman yang mengajak, lama-lama ikut juga. Di rumah juga tidak ada yang mengawasi, bapak dan ibu kan pisah, jadi ya bebas saya."* (Wawancara Informan Anak Binaan, 29 April 2026).

Informan lain juga mengaitkan keterlibatannya dengan kondisi ekonomi keluarga dan ketidakhadiran orang tua. Informan menyatakan:

> *"Kalau saya ekonomi dan keluarga, karena saya juga sendiri di rumah, orang tua tinggal di Pangkal, saya di Sungailiat."* (Wawancara Informan Anak Binaan, 29 April 2026).

Kesamaan pola yang muncul dari beberapa informan menunjukkan bahwa ketidakhadiran figur orang tua sebagai pengawas membuka ruang bagi pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya perilaku menyimpang melalui proses pemaknaan sosial yang keliru, sehingga tindakan yang bertentangan dengan norma dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan pergaulan mereka.

LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang beralamat di Jalan A. Yani No. 16A, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai unit pelaksana teknis negara, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, sebelum membahas proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan, penting untuk memahami kondisi awal anak binaan karena efektivitas rehabilitasi sosial tidak dapat dilepaskan dari akar permasalahan yang mereka hadapi. Program pembinaan yang disusun tanpa mempertimbangkan latar belakang tersebut berpotensi menjadi rutinitas formal yang belum mampu menjawab kebutuhan perubahan perilaku anak binaan secara menyeluruh.

Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial di LPKA tidak diberikan secara langsung, tetapi diawali dengan tahapan asesmen yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kondisi awal setiap anak binaan. Asesmen tersebut meliputi latar belakang kehidupan, kondisi psikologis, hubungan sosial, tingkat pendidikan, serta potensi dan kebutuhan yang dimiliki setiap anak. Hasil asesmen menjadi dasar dalam penyusunan program pembinaan sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing anak binaan. Didik Setiawan menjelaskan bahwa:

> *"Mulai dari anak itu masuk itu diterima oleh bagian registrasi, itu sudah dilangsungkan asesmen awal mulai dari kesehatan. Asesmen tentang risiko untuk menentukan minat bakatnya dan latar belakang sosial serta pendidikan. Asesmen lanjutan tiga bulan itu untuk mengukur sejauh mana anak itu mengikuti kegiatan dan asesmen akhir inilah yang nanti mengukur kesiapan anak untuk dapat menjalankan program pembebasan."* (Wawancara, 29 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, asesmen dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu asesmen awal, asesmen lanjutan, dan asesmen akhir. Asesmen awal bertujuan mengidentifikasi kondisi kesehatan, tingkat risiko, minat dan bakat, serta latar belakang sosial dan pendidikan anak binaan. Asesmen lanjutan dilakukan setelah tiga bulan untuk mengevaluasi perkembangan anak selama mengikuti program pembinaan, sedangkan asesmen akhir digunakan untuk menilai kesiapan anak dalam mengikuti program pembebasan. Ketiga tahapan tersebut menunjukkan bahwa LPKA menerapkan pendekatan yang bersifat individual dan berbasis kebutuhan, sehingga program pembinaan tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan setiap anak binaan.

Rehabilitasi sosial di LPKA dilaksanakan melalui dua program utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut saling melengkapi, dengan pembinaan kepribadian ditempatkan sebagai prioritas utama dalam proses rehabilitasi. Didik Setiawan menegaskan bahwa:

> *"Pembinaan kepribadian yang meliputi agama dan pendidikan itu yang paling penting. Kenapa? Karena anak-anak ini kan masih dalam binaan, jadi dua program itu dirasa yang paling penting, dan gaungkan saja dua hal itu pasti akan berhasil."* (Wawancara, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal dan pembinaan keagamaan menjadi fondasi utama dalam proses rehabilitasi sosial. Sementara itu, pembinaan kemandirian berfungsi sebagai pendukung yang membekali anak binaan dengan

keterampilan untuk menunjang kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Ruang lingkup kedua program tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Didik Setiawan sebagai berikut:

> *"Program pembinaan kepribadian meliputi pendidikan, keagamaan, kesenian dan olahraga, wawasan kebangsaan, serta konseling. Program pembinaan kemandirian melatih keterampilan anak, seperti hidroponik, budidaya, refleksi, pangkas rambut, literasi, dan ecobrik."* (Wawancara, 29 April 2026).

Pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, keagamaan, kesenian, olahraga, wawasan kebangsaan, serta konseling. Pendidikan formal diselenggarakan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan diwajibkan bagi seluruh anak binaan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Didik Setiawan yang menyatakan:

> *"Dari targetnya tercapai, misalkan ada 38 anak binaan, jadi dari 38 anak binaan ini harus sekolah semua."* (Wawancara Informan Didik Setiawan, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi salah satu program pembinaan, tetapi juga merupakan hak setiap anak binaan yang wajib dipenuhi oleh lembaga. Selain pendidikan formal, pembinaan keagamaan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui pembelajaran membaca Al-Qur'an, pendalaman ilmu tajwid, dan ceramah keagamaan secara berkala. Pengembangan minat dan bakat dilakukan melalui kegiatan seni dan olahraga, seperti futsal dan sepak bola, yang juga melibatkan petugas LPKA sehingga terjalin hubungan yang lebih dekat antara petugas dan anak binaan. Di samping itu, pembinaan wawasan kebangsaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara, sedangkan layanan konseling diberikan secara individual melalui wali pemasyarakatan yang berperan sebagai pendamping selama anak menjalani masa pembinaan.

Program pembinaan kemandirian diarahkan untuk membekali anak binaan dengan keterampilan vokasional yang memiliki nilai praktis dan ekonomis. Kegiatan hidroponik melatih ketelitian dalam mengelola kebutuhan nutrisi tanaman, sekaligus menumbuhkan kedisiplinan dan kesabaran selama proses budidaya. Program budidaya memperkenalkan proses produksi pertanian atau peternakan yang dapat membentuk etos kerja dan kemampuan menyelesaikan masalah. Program pangkas rambut memberikan keterampilan yang dapat langsung diterapkan sebagai peluang usaha, sedangkan program literasi bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Program refleksi difokuskan pada pembinaan mental melalui evaluasi terhadap pengalaman hidup, sementara program ecobrik mengembangkan keterampilan pengolahan limbah plastik sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Efektivitas pembinaan kemandirian tercermin dari keterlibatan aktif anak binaan dalam mengikuti setiap program, meningkatnya minat untuk mengembangkan keterampilan sesuai bakat, tumbuhnya kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki, serta berkembangnya orientasi kemandirian ekonomi sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Dalam perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead, berbagai program pembinaan tersebut menjadi ruang interaksi yang menghadirkan *significant others* positif, seperti petugas pembinaan, wali pemasyarakatan, dan pembina keagamaan. Interaksi tersebut berperan dalam membentuk kembali self anak binaan melalui pengalaman sosial yang lebih positif dibandingkan dengan pengalaman sebelum memasuki LPKA.

Selain asesmen formal, LPKA juga menerapkan sistem wali pemasyarakatan sebagai pendekatan personal dalam proses pembinaan. Wali pemasyarakatan berperan sebagai figur pendamping yang membangun hubungan emosional dengan anak binaan selama menjalani masa pembinaan. Didik Setiawan menjelaskan bahwa:

> *"Kita punya yang namanya wali pemasyarakatan, jadi orang tua. Wali inilah yang nantinya akan membangun kedekatan yang akan menjadi pengganti orang tua di sini."* (Wawancara, 29 April 2026).

Keberadaan wali pemasyarakatan merupakan respons terhadap kondisi sebagian besar anak binaan yang berasal dari keluarga kurang harmonis. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan pendampingan, tetapi juga menghadirkan figur pengganti orang tua yang mampu membangun hubungan interpersonal selama proses rehabilitasi. Dalam perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead, wali pemasyarakatan berperan sebagai significant other yang memberikan pengalaman interaksi positif sehingga mendukung rekonstruksi self anak binaan.

Pendekatan tersebut juga dirasakan secara langsung oleh anak binaan. Salah seorang informan mengungkapkan bahwa:

> *"Dari segi perlakuan bagus sih dari awal masuk sampai di BNP dan diperiksa dari awal sampai tahap akhir."* (Wawancara Informan Anak Binaan, 20 Mei 2026).

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa proses penerimaan di LPKA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga membangun persepsi anak binaan bahwa lembaga merupakan lingkungan yang memberikan pendampingan dan dukungan selama menjalani proses rehabilitasi.

Pelaksanaan seluruh program pembinaan didukung oleh sistem instrumen yang bersifat mengikat. Keikutsertaan anak binaan dalam setiap program menjadi salah satu syarat dalam pemenuhan hak bersyarat selama menjalani masa pembinaan. Didik Setiawan menjelaskan bahwa keberhasilan pembinaan diukur melalui tiga indikator, yaitu:

"Anak binaan harus mengakui kesalahan, berjanji tidak mengulangi, dan bersedia berkontribusi kembali." (Wawancara, 29 April 2026).

Ketiga indikator tersebut menggambarkan proses perubahan yang diharapkan selama rehabilitasi sosial, mulai dari tumbuhnya kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, munculnya komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, hingga kesiapan untuk kembali menjalankan peran sosial secara bertanggung jawab. Dalam perspektif Mead, sistem instrumen tersebut merepresentasikan dimensi society, yaitu proses internalisasi norma dan nilai sosial melalui keterlibatan anak binaan dalam berbagai aktivitas pembinaan secara berkelanjutan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial juga didukung oleh perencanaan yang disusun secara sistematis dan dievaluasi setiap tahun. Didik Setiawan menjelaskan bahwa:

"Kita punya rencana strategi, yang mana itu disampaikan awal tahun, tapi kita lihat tahun sebelumnya apa dan yang terjalankan apa, sehingga nanti ke depannya kita bisa mengukur program apa yang akan dimasukkan dalam rencana strategis ke depannya." (Wawancara, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial dikembangkan melalui mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis sehingga program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi pada tahun berikutnya. Selain itu, LPKA menerapkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak eksternal dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Didik Setiawan menjelaskan bahwa:

"Kita butuh sebanyak-banyaknya menggandeng pihak eksternal dari berbagai pihak instansi, LSM, swasta, dan komunitas sehingga pada saat nanti mereka keluar tidak akan kaget lagi dengan kehidupan di luar." (Wawancara, 29 April 2026).

Keterlibatan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga mempersiapkan anak binaan untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi sarana bagi anak binaan untuk mengenal lingkungan sosial yang lebih luas sebelum menjalani proses reintegrasi.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di LPKA tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sebagian besar anak binaan berasal dari keluarga yang kurang harmonis dan memiliki riwayat pergaulan negatif sehingga nilai serta pola perilaku yang telah terbentuk sebelumnya tidak dapat diubah dalam waktu singkat selama menjalani masa pidana. Tantangan lainnya muncul pada tahap reintegrasi sosial, karena mantan anak binaan masih menghadapi stigma dari masyarakat yang dapat memengaruhi proses penyesuaian setelah kembali ke lingkungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak

hanya ditentukan oleh kualitas program pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat. Keterlibatan kedua unsur tersebut menjadi faktor penting agar perubahan perilaku yang terbentuk selama proses pembinaan dapat dipertahankan setelah anak binaan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dampak Rehabilitasi Sosial terhadap Kesiapan Anak Binaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang memberikan dampak terhadap kesiapan anak binaan dalam menjalani kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Dampak tersebut teridentifikasi dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu perubahan perilaku dan kedisiplinan, perkembangan kemampuan interaksi sosial, serta peningkatan kesadaran diri dan orientasi masa depan. Ketiga dimensi tersebut mencerminkan perubahan yang terjadi selama anak mengikuti proses rehabilitasi sosial di dalam lembaga.

Dimensi pertama berkaitan dengan perubahan perilaku dan kedisiplinan anak binaan. Perubahan tersebut terlihat dari keteraturan rutinitas harian, kepatuhan terhadap tata tertib, kemampuan mengendalikan diri, serta perubahan motivasi dalam mengikuti program pembinaan. Salah seorang anak binaan mengungkapkan bahwa:

> *"Banyak, bang, makan lebih teratur, tidur teratur, lebih disiplin dan lebih terarah kami di sini."* (Wawancara Informan Anak Binaan, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses rehabilitasi telah membentuk pola kehidupan yang lebih teratur dibandingkan sebelum menjalani pembinaan. Rutinitas harian yang dijalankan secara konsisten tidak hanya menciptakan kedisiplinan, tetapi juga membentuk kebiasaan baru yang mendukung perubahan perilaku anak binaan.

Perubahan perilaku tersebut juga tercermin dari kepatuhan anak binaan terhadap tata tertib lembaga. Seluruh kegiatan pembinaan diikuti secara konsisten karena menjadi bagian dari proses rehabilitasi sekaligus tercatat dalam rapor pembinaan. Kepatuhan tersebut tidak hanya didorong oleh kewajiban mengikuti aturan, tetapi juga oleh kemampuan anak binaan dalam mengendalikan diri selama menjalani pembinaan. Salah seorang informan menyampaikan bahwa:

> *"Malah kami ingin banyak kegiatan jadi biar tidak terasa waktunya, malas sih malas tapi daripada tidak ada kegiatan lagi."* (Wawancara Informan Anak Binaan, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa anak binaan mampu mengelola rasa malas dan tetap berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan adanya

perubahan motivasi, yaitu dari mengikuti kegiatan karena kewajiban menjadi kesadaran bahwa aktivitas pembinaan memberikan manfaat bagi diri mereka selama berada di LPKA.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead, perubahan tersebut mencerminkan berkembangnya dimensi mind. Jadwal kegiatan, tata tertib, dan rutinitas pembinaan tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembatasan, tetapi dimaknai sebagai pedoman yang membantu anak binaan mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan makna terhadap simbol-simbol sosial tersebut menjadi dasar terbentuknya perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Perkembangan kemampuan interaksi sosial menjadi dimensi kedua yang menunjukkan dampak rehabilitasi sosial terhadap kesiapan anak binaan. Perubahan tersebut terlihat dari terbangunnya hubungan yang lebih terbuka dengan petugas, kemampuan beradaptasi dengan sesama anak binaan, keterlibatan dalam berbagai kegiatan kolektif, serta meluasnya interaksi sosial melalui kehadiran pihak eksternal di lingkungan LPKA.

Hubungan antara anak binaan dan petugas tidak hanya berlangsung dalam konteks pembinaan formal, tetapi juga terbangun melalui interaksi sehari-hari. Salah seorang anak binaan mengungkapkan bahwa:

> *"Ngaji bang, ada juga misal main bola bang semua petugas itu ikut juga bang, dan biasanya kami itu juga diajak ngobrol bersama-sama mereka."* (Wawancara Informan Anak Binaan, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara petugas dan anak binaan berlangsung secara lebih terbuka sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan yang bersifat hierarkis. Kedekatan tersebut diperkuat melalui pendekatan personal yang diterapkan dalam proses pembinaan. Didik Setiawan menjelaskan bahwa:

> *"Sudah ada tolok ukur, sudah dibagi kelas, dari mulai yang pemurung, ditanyakan apa yang terjadi, kedekatan. Poin utamanya itu pendidikan, kita wajib membekali rasa kepercayaan mereka itu dengan pendidikan."* (Wawancara Informan Didik Setiawan, 29 April 2026).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun hubungan interpersonal yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan anak binaan kepada petugas. Hubungan yang terjalin melalui komunikasi dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mendukung proses rehabilitasi sosial. Kemampuan beradaptasi juga terlihat dalam hubungan antarsesama anak binaan. Salah seorang informan menyampaikan bahwa:

"Bisa sih menyesuaikan diri, saya kalau di kamar sama teman itu biasanya cerita." (Wawancara Informan Anak Binaan, 20 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa anak binaan mampu membangun hubungan sosial melalui komunikasi dan saling berbagi pengalaman selama menjalani masa pembinaan. Interaksi tersebut menciptakan lingkungan yang lebih suportif sehingga membantu anak binaan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam lembaga.

Selain itu, kemampuan interaksi sosial juga berkembang melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan bersama, seperti kegiatan rekreasi, menonton, bermain musik, olahraga, maupun pelatihan keterampilan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak binaan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Interaksi sosial semakin luas dengan adanya tenaga magang dan pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan sehingga anak binaan memperoleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan di luar petugas dan sesama warga binaan.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead, perubahan tersebut menunjukkan berkembangnya dimensi society. Melalui interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan dengan petugas, sesama anak binaan, maupun pihak eksternal, anak binaan belajar memahami norma, harapan, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Proses tersebut membentuk kemampuan mereka untuk menyesuaikan perilaku dengan lingkungan sosial yang lebih luas sebagai bekal dalam menghadapi proses reintegrasi setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Dimensi ketiga yang menunjukkan dampak rehabilitasi sosial adalah meningkatnya kesadaran diri dan berkembangnya orientasi masa depan anak binaan. Perubahan tersebut terlihat dari kemampuan anak binaan merefleksikan pengalaman hidup, meningkatnya kepercayaan diri, munculnya perencanaan terhadap masa depan, serta kemampuan menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tuntutan sosial selama menjalani masa pembinaan. Kesadaran diri berkembang melalui proses refleksi terhadap pengalaman yang dialami selama berada di LPKA. Salah seorang anak binaan mengungkapkan bahwa:

"Ditambah lagi ekskulnya, karena saya ini masih proses mencari jati diri, jadi kalau banyak program jadi saya tahu mau pilih ekskul apa yang cocok buat saya." (Wawancara Informan Anak Binaan, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anak binaan tidak lagi memandang program pembinaan sebagai aktivitas yang bersifat wajib, tetapi sebagai kesempatan untuk mengenali potensi dan minat yang dimiliki. Kesempatan mengikuti berbagai kegiatan membantu mereka memahami kemampuan diri sekaligus menentukan arah pengembangan diri setelah menyelesaikan masa pembinaan. Peningkatan kesadaran diri juga diikuti dengan

tumbuhnya rasa percaya diri melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan selama rehabilitasi sosial. Didik Setiawan menjelaskan bahwa:

> *"Poin utamanya itu pendidikan, kita wajib membekali rasa kepercayaan mereka itu dengan pendidikan."* (Wawancara Informan Didik Setiawan, 29 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan diri anak binaan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa rasa percaya diri tersebut berkembang seiring bertambahnya pengalaman dalam mengikuti pelatihan keterampilan. Anak binaan yang pada awalnya merasa ragu ketika belajar memangkas rambut, secara bertahap berani mempraktikkan keterampilan tersebut kepada sesama anak binaan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menguasai keterampilan mampu meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri.

Perubahan tersebut juga tercermin dari berkembangnya orientasi masa depan. Anak binaan mulai menunjukkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan yang dimiliki, serta merencanakan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya mendorong perubahan perilaku selama berada di dalam lembaga, tetapi juga membangun kesiapan menghadapi kehidupan setelah masa pembinaan berakhir.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead, perubahan tersebut menunjukkan berkembangnya dimensi self. Proses interaksi yang berlangsung selama rehabilitasi mendorong anak binaan membangun kembali identitas dirinya melalui pengalaman belajar, pendampingan, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan pembinaan. Identitas yang semula dilekatkan pada pelanggaran hukum secara bertahap bergeser menjadi identitas yang lebih positif, ditandai dengan tumbuhnya rasa percaya diri, kemampuan mengenali potensi diri, dan kesiapan menjalankan peran sosial di masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku, tetapi juga mendorong perubahan pada cara anak binaan memaknai diri dan lingkungan sosialnya. Perubahan tersebut terlihat melalui terbentuknya kedisiplinan, berkembangnya kemampuan berinteraksi dengan orang lain, serta meningkatnya kesadaran diri dan orientasi masa depan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk kesiapan anak binaan untuk kembali menjalankan fungsi sosial di tengah keluarga maupun masyarakat.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead, perubahan tersebut berlangsung melalui proses pembentukan mind, society, dan self yang saling memengaruhi. Rutinitas pembinaan, aturan lembaga, serta interaksi dengan petugas dan sesama anak binaan membentuk cara anak memaknai pengalaman sosialnya (mind). Interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan membantu anak memahami norma dan harapan sosial yang berlaku (*society*). Selanjutnya, proses tersebut mendorong terbentuknya identitas diri

yang lebih positif (*self*), sehingga anak binaan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk beradaptasi dan menjalankan peran sosial setelah kembali ke masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan setelah anak menyelesaikan masa pembinaan. Oleh karena itu, keberlanjutan perubahan perilaku memerlukan sinergi antara LPKA, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah agar proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara optimal. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga perubahan positif yang telah terbentuk selama masa rehabilitasi sehingga anak binaan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalani kehidupan secara produktif dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Rehabilitasi sosial anak binaan di LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan asesmen, pembinaan kepribadian dan kemandirian, evaluasi berbasis instrumen mengikat, serta persiapan reintegrasi sosial. Program tersebut memberikan dampak positif terhadap kesiapan anak binaan melalui perubahan perilaku yang lebih disiplin, berkembangnya kemampuan interaksi sosial, serta meningkatnya kesadaran diri dan orientasi masa depan. Dalam perspektif interaksionisme simbolik Mead, proses ini membentuk *mind* sebagai cara berpikir reflektif, *self* sebagai identitas diri yang lebih positif, dan *society* sebagai internalisasi norma sosial. Dengan itu disarankan agar LPKA memperkuat variasi program kemandirian sesuai minat anak, pemerintah memperkuat dukungan kebijakan pascapembinaan, keluarga meningkatkan penerimaan dan pengawasan, masyarakat mengurangi stigma, serta peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan dan pendekatan penelitian mengenai rehabilitasi sosial anak binaan berhadapan hukum, termasuk menelusuri lebih dalam keberlanjutan dampak pascapembebasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pangkalpinang atas izin, akses data, dan kesediaan seluruh informan dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 592–599. Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V6i2.28348

Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism. In The Social Science Encyclopedia. Https://Doi.Org/10.4135/9781452233925.N20

Buana, S. R. R., Toni, T., & Agustian, R. A. (2025). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Pangkalpinang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 65–80. Https://Doi.Org/10.59582/Sh.V18i02.1297

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Pedoman Pembinaan Anak Di LPKA*. Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Vol. 1)*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Data Perkara Anak Yang Masuk Ke Pengadilan Negeri (Mahkamah Agung RI).*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI-PPA): Statistik Kekerasan Terhadap Anak 2024*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri (Januari–Agustus 2023).*

Mead, G. H. (1934). Mind, Self And Society From The Standpoint Of A Social Behaviorist. *The Modern Schoolman*, 13(2), 43–43.

Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 99–116.

Parasian, W., & Rohayati, A. C. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan Biopsikososial Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, 4(1), 1–12. Https://Doi.Org/10.56799/Jceki.V4i1.7244

Prayitno, K. P., Oktobrian, D., & Barkhuizen, J. (2023). Addressing Prison Education And The Obstacles In Ensuring The Right To Education In Indonesian Juvenile Correctional Facilities. *Journal Of Southeast Asian Human Rights*, 7(2), 123–153. Https://Doi.Org/10.19184/Jseahr.V7i2.42656

Puskinas Bareskrim Polri. (2025). *Data Anak Dan Remaja Berhadapan Dengan Hukum Hingga November 2025*. Pusat Analisis Kejahatan Dan Informasi Kriminal, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 3(1), 66–71. Https://Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374

Shaleh, A. S. A., Maldun, S., & Juharni, J. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Publician: Journal Of Public Service, Public Policy, And Administration*, 1(2), 93–102. Https://Doi.Org/10.56326/Jp.V1i2.1545

Universitas Medan Area. (2024). *Perlindungan Anak Sejak Dini: Fondasi Masa Depan Yang Aman Dan Sejahtera.* Https://Bpjiid.Uma.Ac.Id/2024/09/30/Perlindungan-Anak-Sejak-Dini-Fondasi-Masa-Depan-Yang-Aman-Dan-Sejahtera/